



KORAN	HAL
Haluan	
Padang Ekspres	2
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Bareskrim Geledah Kantor Ditjen EBTKE

Dugaan Korupsi PJUTS

Jakarta, Padek—Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Ditpidkor) Bareskrim menggeledah kantor Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM kemarin (4/7). Penggeledahan tersebut terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan penerangan jalan umum tenaga surya (PJUTS). Ditaksir negara

mengalami kerugian mencapai Rp 64 miliar. Wadir Ditpidkor Bareskrim Polri Kombespol Ariel Adiharsa menuturkan, penggeledahan dilakukan di kantor Ditjen EBTKE di Jalan Pegangsaan Timur, Menteng, Jakarta Pusat. Penggeledahan dilakukan petugas sejak Kamis pagi. "Penyidik sudah di lokasi," paparnya kemarin. Penggeledahan tersebut terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan PJUTS pada 2020 lalu. Proyek pengadaan itu dikerjakan banyak titik yang

tersebar di tiga wilayah, yakni Barat, Tengah dan Timur. "Dalam prosesnya pengadaan dan pelaksanaan diduga terjadi tindak pidana korupsi," terangnya. Dugaan korupsi itu diduga terjadi untuk pengadaan dan pelaksanaan PJUTS yang berada di wilayah Tengah. Status kasus dugaan korupsi tersebut dalam tahap penyidikan.

"Kami masih dalam," terang mantan penyidik KPK tersebut. Nilai kontrak pengadaan PJUTS di wilayah Tengah tersebut senilai Rp 108 miliar. Dari penilaian petugas ditaksir terjadi kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp 64 miliar. Namun, jumlah kerugian tersebut masih bisa berubah. "Nilai kerugian negara belum bersitat

final," urainya. Penyidik masih menunggu hasil perhitungan dari ahli. Untuk menentukan nilai kerugian negara tersebut, biasanya dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Kita tunggu dari ahlinya," jelasnya. Namun begitu, Ariel belum

merinci bagaimana proses terjadinya dugaan korupsi tersebut. Siapa saja yang diduga terlibat juga belum diungkapkan. "Pada pokoknya terjadi penyimpangan dalam proyek penerangan jalan umum tenaga surya," tegasnya. Diketahui bahwa proyek PJUTS merupakan program pemerintah yang pengadaan-

nya dikelola oleh Kementerian ESDM. Dalam pengadaan dilakukan dengan sumber garan dari APBN. Berdasarkan data dari kementerian ESI sejak 2015 hingga 2022 tercatat 111.233 unit PJUTS telah dibangun yang menerangi sepanjang kurang lebih 5 kilometer se-Indonesia. (i jpg)